

SIARAN PERS

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



Penyerahan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2017

Pontianak, Jumat (4 Agustus 2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2017 kepada 15 entitas provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Penyerahan dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan telaah yang dilakukan pada tanggal 17-21 Juli 2017 atas dokumen tindak lanjut entitas sampai dengan Semester I Tahun 2017, terdapat 4.157 temuan dan 9.414 rekomendasi. Terdapat kenaikan jumlah temuan sebanyak 123 dan rekomendasi sebanyak 375 dari semester sebelumnya. Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan berdasarkan hasil telaah atas dokumen tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebesar Rp221.273.762.282,53 atau sejumlah 74,74%, terdapat kenaikan sejumlah 2,81% dari semester sebelumnya. Aset dan uang yang telah disetorkan ke kas negara atau daerah sebesar Rp231.087.405.913,76, meningkat sebesar Rp6.225.645.284,66 dari Semester II Tahun 2016.

Pada pemantauan tindak lanjut kali ini, menurut hasil rekapitulasi yang dilakukan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2017, Kabupaten Landak memperoleh prestasi paling baik dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan menyisakan 5,66% yang belum dan sedang dalam proses tindak lanjut. Sedangkan Kabupaten Melawi memperoleh persentase terendah dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga masih terdapat 40,16% rekomendasi yang belum dan sedang dalam proses tindak lanjut.

Terdapat beberapa faktor baik teknis maupun non teknis yang menghambat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sejalan dengan permasalahan tindak lanjut ini, BPK RI berencana untuk mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk membahas status tindak lanjut kategori 2 yaitu yang belum selesai ditindaklanjuti dan kategori 3 yaitu yang belum ditindaklanjuti untuk temuan pemeriksaan tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai salah satu usaha untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK mengagendakan penandatanganan Komitmen Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi antara Auditor Utama Keuangan Negara VI dengan Kepala Perwakilan BPK Wilayah Timur. Selanjutnya juga akan diadakan penandatanganan komitmen percepatan tindak lanjut antara Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Barat dengan masing-masing Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan salah satu strategi BPK agar tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera diselesaikan.

Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Wizar Dien Yatim

Informasi lebih lanjut:

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak.

☎ (0561) 585349

🌐 pontianak.bpk.go.id, ✉ bpkpontianak@gmail.com